

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Peran dan kinerja pemerintah berdampak pada kemajuan negara. Pemerintah harus dapat mendukung organisasi atau instansi penyedia dalam layanan publik agar dapat mengatur aset-aset publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, sebagai bentuk rasa pertanggung jawaban terhadap masyarakat. Pemerintah melakukan pertanggungjawaban organisasi atau institusi publik untuk bisa melaksanakan pengelolaan organisasi secara yang efisien, ekonomi, dan efektif yang disebut sebagai akuntabilitas kinerja pemerintah (Susanti dan Irianto, 2023). Perluasan sektor publik di Indonesia saat ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan lembaga publik untuk memikul lebih banyak tanggung jawab dalam melaksanakan proyek penelitian di tingkat pemerintahan nasional dan daerah. Salah satu syarat terpenting untuk menerapkan *good governance* adalah akuntabilitas.

Bertanggung jawab berarti bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa tanggung jawab untuk menjaga integritas kewajiban pelaporan tidak dapat diabaikan.

Masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan kewajiban penelitian, seseorang memahami perlunya menunjukkan bahwa sumber daya publik digunakan secara ekonomis, efektif, dan efisien (Mardiasmo 2009:121 dalam Safryani dan Masdjojo, 2022). Lembaga publik di tingkat nasional atau regional memiliki tuntutan akuntabilitas yang mengharuskan semua lembaga pemerintah untuk mengembangkan rencana strategis, mengukur kinerja, dan memberikan laporan tentang temuan mereka. Hal Ini mempengaruhi upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Studi menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan ketidakadilan dan inefisiensi dalam penggunaan dan distribusi sumber daya, yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakatnya. Hasilnya, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, dan kewajiban untuk mengingat sesama dapat diperkuat.

Tanggung jawab kinerja mengacu pada tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan misi organisasi guna memenuhi tujuan dan standar yang ditetapkan oleh sistem pelaporan yang diterapkan secara berkala. Kemampuan lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan anggarann Negara untuk pelayanan publik ke arah *good governance* yang demokratis merupakan komponen kunci dari akuntabilitas kinerja, yang merupakan langkah paling krusial menuju tata kelola pemerintahan yang baik. (Juliastuti *et al.*, 2022). Banyak faktor yang memengaruhi efektivitas manajemen kinerja dalam administrasi kota. Namun, tingkat kejelasan dalam tujuan anggaran dan kontrol manajemen akuntansi, serta partisipasi organisasi, digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel moderator untuk

mengukur dampak faktor-faktor ini terhadap kinerja. LAKIP menetapkan kewajiban bagi kepala negara untuk mengungkapkan kepada publik kinerja negara pada tahun anggaran. LAKIP bertujuan untuk menunjukkan bagaimana rencana strategis dilaksanakan di setiap perangkat daerah untuk memenuhi tanggung jawab dan fungsi utama organisasi, serta relevansi keberhasilan terkini dalam meningkatkan mutu hasil kinerja yang diantisipasi pada tahun mendatang.

Dalam pemerintahan, anggaran hal yang cukup penting, terutama jika menyangkut tanggung jawab pekerjaan umum. Semuanya tergantung pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR/DPRD, yang akan berfungsi sebagai kelompok advokasi pemilih ke depannya (Mardiasmo 2006 dalam Precelina dan Wuryani, 2018). Ada beberapa ciri sistem penganggaran, kejelasan anggaran adalah salah satu cirinya (Kenis 1979 dalam Precelina dan Wuryani, 2018). Menurut teori penetapan tujuan, menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Ketika sasaran anggaran didefinisikan dengan baik, pelaporan kinerja menjadi lebih terlihat.

Mulya dan Fauzihardani (2022) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi adalah proses menjaga atau mengubah pola operasi atau aktivitas instansi. Ketika pemerintah memiliki pengawasan atas pengendalian akuntansi, pemerintah dapat mengawasi dan mengevaluasi semua tugas dan prosedurnya. Menurut Pratama (2019) menyatakan dengan menggunakan pengendalian akuntansi, ditentukan apakah langkah-langkah yang diambil

oleh pemerintah untuk memperluas layanannya kepada masyarakat efektif, efisien, dan hemat biaya. Pemerintah daerah yang kompeten dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dengan memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis kepada masyarakat luas.

Dapat dipahami adanya keinginan kuat untuk terus menjadi anggota organisasi yang menjunjung tinggi komitmen. Hal ini akan mewujudkan keinginan tersebut, bahwa semua tindakan yang diambil atas nama organisasi dilakukan sesuai dengan nilai dan tujuannya. Keterlibatan organisasi ini ditunjukkan oleh kesetiaan pegawai yang teguh terhadap atasannya demi keberhasilan dan kesejahteraan organisasi. (Astuti, 2022). Akuntabilitas seseorang yang kurang melibatkan atau yang prinsipnya bertentangan dengan visi dan tujuan organisasi hanya akan mengakibatkan akuntabilitas yang lebih rendah. Sebab, tujuannya tidak logis atau tidak sinkron sehingga membuatnya sulit tampil maksimal. Oleh karena itu, komitmen ini sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas karena ini merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Objek penelitian ini adalah Bakeuda Kota Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang susunan dan tata kerja Dinas Daerah Kota Tegal. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 yang mengatur tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kota Tegal merupakan peraturan berikutnya yang berlaku setelah peraturan daerah tersebut. Disebutkan bahwa salah satu fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Tegal adalah melaksanakan tugas pengawasan di bidang

perencanaan dan pengendalian operasional, pendataan, pelaporan, dan pengalokasian, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Bakeuda Kota Tegal merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah meliputi sasaran: sistem, mutu, pelaporan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Hal ini dicapai melalui penerapan sistem dan pembuatan anggaran penerimaan dan pengeluaran regional. Selain itu, Bakeuda Kota Tegal mempunyai struktur organisasi yang lebih khusus yaitu Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Pendapatan, Bidang Pendapatan, Penetapan dan Pemungutan, Bidang Anggaran, dan bidang lainnya yang tidak terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Pemerintah Kota Tegal melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Anggaran Keluaran Daerah. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 35 Tahun 2022 yang mengatur penggunaan kartu kredit oleh pemerintah kota dalam pelaksanaan APBD. Selain itu, Pengelola Keuangan OPD di Pemerintah Kota Tegal akan diberitahukan mengenai pelaksanaan APBD dan cara penggunaan serta pengoperasian Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi di Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota serta Tata Cara Pelaksanaan Elektronisasi Transaksi Pemerintah Daerah, implementasi KKPD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penatausahaan belanja daerah dengan membuat dokumen digital pada Pemerintah Kota Tegal. Namun implementasi KKPD ini mengalami kendala yang diakibatkan oleh pegawai-pegawai yang masih belum sepenuhnya mengerti tentang penggunaan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah), selain itu pengimplentasian KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) masih dalam tahap penerbitan fisik kartu oleh Bank Penerbit KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) sehingga dapat dikatakan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah) belum sepenuhnya diimplentasikan, kemudian berdasarkan LKjIP pada Bakeuda Kota Tegal menunjukkan terdapat permasalahan seperti penerimaan pendapatan daerah yang belum optimal dan pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, dengan begitu akan mengakibatkan terhambatnya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Fenomena yang terjadi adalah meningkatnya akuntabilitas lembaga pemerintah atas kemampuannya untuk melaksanakan misi organisasi secara efektif dan memenuhi tujuan serta sasarannya. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara adil, pemerintah harus berfokus pada sejumlah isu, seperti komitmen organisasi, pengendalian akuntansi, dan kejelasan sasaran anggaran. Jika ada anggaran yang jelas, akan lebih mudah untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan tugas-tugas organisasi yang dilaksanakan untuk memenuhi tujuan dan rumusan target yang ditentukan. Melalui pengendalian akuntansi, semua kegiatan dan kewajiban yang

dilakukan oleh pemerintah dapat dipantau, dikendalikan, dan dievaluasi. Dengan komitmen organisasi, ini sangat penting karena sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari instansi pemerintah.

Para peneliti sebelumnya telah meneliti tugas lembaga pemerintah untuk meninjau kinerja mereka berdasarkan banyak faktor yang memengaruhinya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aglisnema (2019), Hasanah (2021), Mulya dan Fauzihardani (2022) menunjukkan bahwa kebutuhan pemerintah akan transparansi memiliki dampak positif atau signifikan terhadap kejelasan tujuan anggaran. Sedangkan peneliti Safitri (2020) serta Hafzhan (2021) menguraikan bagaimana kemampuan pemerintah untuk memantau kinerjanya telah dipengaruhi secara negatif oleh kejelasan tujuan anggaran.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Susanti dan Irianto (2023) dan Hasanah (2021), menyatakan bahwa pengendalian pengungkapan akuntansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kewajiban instansi negara dalam menyimpan catatan tindakannya. Sedangkan menurut penelitian Safitri (2020) menegaskan bahwa tidak ada dampak positif yang nyata dari pengendalian pengungkapan akuntansi terhadap kewajiban otoritas negara untuk melaporkan kinerja mereka.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang menghasilkan hasil yang tidak konsisten, penelitian ini membuat perbedaan dengan memasukkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Menurut Robbins dan Judge dalam Depari (2021) komitmen organisasi digunakan sebagai variabel moderasi karena sangat penting bagi terciptanya kewajiban

mengingat yang lebih baik karena merupakan kewajiban bagi masyarakat luas. Hal ini dapat memperkuat atau melemahkan dampak tujuan anggaran yang jelas dan kontrol akuntansi terhadap kebutuhan instansi pemerintah untuk menggunakan sumber daya mereka secara bijaksana saat menerapkan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal?
2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal?
3. Apakah kejelasan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal melalui komitmen organisasi sebagai variabel moderasi?
4. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal melalui komitmen organisasi sebagai variabel moderasi?



5. Apakah komitmen organisasi sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang telah terbentuk, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi sebagai variabel moderasi antara kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi sebagai variabel moderasi antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi sebagai variabel moderasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kota Tegal.

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada bidang komitmen organisasi, kejelasan anggaran, dan pengendalian akuntansi dalam akuntabilitas kinerja pemerintah di badan keuangan daerah Kota Tegal. Oleh karena itu, penelitian ini belum komprehensif dan belum terperinci.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi masing – masing pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa, diharapkan bahwa akan ada sumber yang dapat memberikan informasi lebih lanjut, khususnya tentang pengaruh pengawasan akuntansi dan kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - b. Bagi Peneliti berikutnya, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Bagi Peneliti, sejauh komitmen organisasi merupakan variabel moderasi, para peneliti berharap bahwa penelitian ini akan menghasilkan wawasan dan pedoman baru mengenai dampak pengawasan akuntansi dan kejelasan anggaran terhadap kinerja lembaga pemerintah.
2. Manfaat Praktisi
  - a. Bagi Badan Keuangan Daerah, diharapkan hal ini akan memberikan dampak positif dan menjadi titik awal diskusi mengenai kejelasan

sasaran anggaran, pertimbangan transparansi, dan keterlibatan organisasi dalam memengaruhi persyaratan penilaian kinerja oleh otoritas pemerintah. Diharapkan juga akan ditemukan sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan penilaian untuk meningkatkan persyaratan kinerja lembaga pemerintah.

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah